

**ISLAM DAN PENDIDIKAN MULTIKULTUR DI
INDONESIA**
**(Menggagas Pendidikan ber-Wawasan Kebangsaan yang
Egaliter, Humanis, dan Inklusif)**

*Syamsun Ni'am*¹

Abstrak

Indonesia dengan keragaman etnis, budaya, tradisi, kelompok-kelompok sosial, agama, dan sebagainya, di satu sisi memang telah memunculkan kekayaan dinamisitas keberagaman budaya dan peradaban positif; namun pada sisi lain, hal tersebut suatu saat bisa saja justru menjadi pemicu konflik dan perpecahan, jika tidak dikelola dan di manaj secara baik, arif, dan komprehensif. Oleh karena itu, pendidikan multikultur di Indonesia, barangkali tidak hanya didiskusikan sebatas diskursus akademis semata, namun harus menjadi sebuah tuntutan bahkan kebutuhan mendesak untuk segera diimplementasikan dalam ranah yang lebih konkrit dan luas —antara lain pada dunia pendidikan. Pendidikan multikultur adalah reformasi dan sekaligus proses pendidikan yang menanamkan nilai-nilai dan keyakinan kepada siswa akan pentingnya mengakui keunikan identitas tiap-tiap etnis, kelompok budaya, maupun kelompok sosial lainnya. Paling tidak ada lima cakupan pokok dalam pendidikan multikultur, yaitu: (1) Promosi untuk memperkuat keragaman budaya, (2) promosi bagi HAM dan menghargai orang lain yang berbeda, (3) promosi untuk melakukan pilihan hidup alternatif bagi setiap orang, (4) promosi perlunya keadilan sosial dan kesempatan yang sama bagi setiap orang, dan (5) promosi akan pentingnya kesamaan dan distribusi kekuasaan antar berbagai kelompok sosial.

Kata Kunci:

Islam-pendidikan multikultur- egaliter- humanis-inklusif

¹ Penulis adalah Dosen STAIN Jember

A. PENDAHULUAN

Kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, sebenarnya telah kenyang dengan berbagai pengalaman dan pelajaran pahit dari berbagai konflik dan kekisruhan sosial yang terjadi pada beberapa bagian di wilayah Negara Kesatuan RI ini. Hal ini telah menyadarkan kita sebagai bangsa yang multi etnik, bahwa kebanggaan akan kehidupan kebangsaan yang bersifat multi etnik dan multi budaya adalah sebuah bayang-bayang semu.² Terbukti tidak menjanjikan sebuah kehidupan yang nyaman, sejahtera, adil dan demokratis. Oleh karena itu, diperlukan sebuah wawasan kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai egalitarianisme, humanisme, dan inklusifisme.

Memang, di setiap negara atau lingkungan masyarakat tertentu akan didapati dua atau lebih golongan atau kelompok masyarakat, seperti ada golongan Islam —NU, Muhammadiyah, al-Irsyad, al-Washliyah, Ahmadiyah, Syi'ah-Sunni, dan sebagainya—, Kristen —Katolik, Evangelical, Ekuiminical, Dominican, Protestan, dan lain-lain—; juga Hindu, Budha, Kong Hu Cu; dan ada pula pengelompokan lain, seperti ada masyarakat pribumi, non pribumi, yang dipertajam oleh perbedaan tingkat kehidupan masing-masing golongan atau kelompok, yang sedang menimbulkan permasalahan sosial sebagaimana yang dialami bangsa Indonesia selama ini. Perbedaan suku, agama, ras, tradisi, budaya (kultur), antar golongan, antar dan intern agama, dan lain-lain itulah yang selalu didakwa sebagai perbedaan yang akan sarat dengan muatan konflik; yang oleh sebab itu hanya akan mengancam perpecahan belaka³. Padahal eksistensi seseorang terlahir dalam perbedaan-perbedaan tertentu, sebenarnya bukanlah pilihannya, melainkan sebagai sebuah keniscayaan yang melekat pada kenyataan yang menyatu pada kemanusiannya.

² I.G. Widja, dan K. Putra, *Pendidikan Multikultur*. makalah disajikan dalam *Konvensi Nasional pendidikan Indonesia V*, Surabaya: 5-9 Oktober 2004)

³ Sutandyo Wignyosubroto, “*Pluralitas dalam Realitas Kehidupan Nasional (dengan Berbagai Permasalahan SARA-nya), Pluralisme dan Persatuan Indonesia*”, Makalah disampaikan pada *Seminar Nasional “Konsep SARA dalam Tinjauan”*, (Surabaya: Kosmopolit, 1998), 1

Adalah suatu keniscayaan, jika di era reformasi ini pola berpikir keseragaman (monokultur) yang terbukti tidak efektif untuk mengelola masyarakat dan bangsa yang multi etnik dan multi budaya ini harus ditinggalkan. Sebagai gantinya, pola berfikir keberagaman (multikultur) mulai diberikan porsi yang seimbang untuk memberikan kebebasan dan otonomi kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan jati dirinya dan mengartikulasikan segala potensinya.

Pendidikan multikultur merupakan wahana untuk mengembangkan wawasan, mengkonstruksi pengetahuan, membina sikap toleran dan memberikan keterampilan kepada siswa untuk hidup “bersama” dengan siswa lain yang berbeda budaya (kultur) maupun agama.

Gagasan dasar pendidikan multikultur adalah bagaimana seluruh siswa laki-laki, perempuan, yang sehat dan cacat, miskin, kaya, terdiri atas berbagai kelompok ras, agama, gender, dan etnik yang beragam, ataupun berbicara dalam ragam bahasa –seluruhnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di sekolah.

Pendidikan multikultur sebagai sebuah gagasan pendidikan yang ingin memberikan kesetaraan dan pengakuan akan ragam budaya memiliki sejarah panjang. Praktek pendidikan multikultur di berbagai negara, baik di Barat maupun di Timur telah menghasilkan suatu kesepakatan bersama (*mutual agreement*), bahwa salah satu pilar pendidikan adalah “*living together*” yakni memberikan latihan dan keterampilan kepada para siswa akan pentingnya pengakuan dan penghargaan kepada orang yang memiliki ragam bahasa, budaya, etnis maupun agama.

B. ISLAM DAN PENDIDIKAN MULTIKULTUR : BELAJAR DARI PESANTREN

Multikulturalisme, secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sistem nilai atau kebijakan yang menghargai keragaman dalam suatu masyarakat yang didasarkan kepada kesediaan untuk menerima dan menghargai keberadaan kelompok lain yang berbeda suku, etnik, jender, maupun agama⁴. Secara normatif-

⁴ M. Syafi'i Anwar, “Menggali Kearifan Pesantren untuk Multikulturalisme”, dalam (*Al-Wasathiyah*, Vol. 01, No. 01 Februari 2006), 2

teologis, Islam sebenarnya sejak awal telah mengajarkan nilai-nilai penghormatan dan penghargaan atas keberbedaan (*diversity*) yang ada, apapun perbedaan yang muncul di bumi ini.

Oleh karena itu, paling tidak ada 3 perspektif untuk melihat kaitan antara Islam dengan Pendidikan Multikultur:

a. Persepektif Teologis:

Ada beberapa ayat al-Qur'an yang secara jelas (*sharih*) sangat apresiatif terhadap tumbuhnya nilai-nilai perbedaan, baik gender, bangsa maupun suku, seperti pada Surat al-Hujurat: 13⁵ demikian pula pada Surat ar-Rum: 22 juga ditunjukkan tentang keharusan untuk saling menghormati dan menghargai di antara perbedaan bahasa dan warna kulit.⁶ Hal senada juga terdapat dalam Surat al-Ma'idah: 48⁷

Dua ayat al-Qur'an yang pertama, al-Hujurat: 12 dan ar-Rum: 22 di atas, telah memberikan beberapa aksentuasi penting tentang pengakuan keberadaan "lian" menjadi bagian tak terpisahkan dari yang "lain". Perbedaan gender, bangsa, suku, bahasa, warna kulit, adalah semata-mata perbedaan artifisial yang sudah dikonstruksi oleh Allah dalam rangka pemenuhan kebutuhan kelengkapan hidup dan kehidupan di dunia. Inilah yang kemudian disebut dengan *Sunnatullah* yang bisa menimpa siapa saja yang hidup di dunia. Jika demikian adanya, maka setiap perbedaan yang muncul —termasuk

⁵ "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"

⁶ "di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui"

⁷ "Dan Kami Telah turunkan kepadamu al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu".

perbedaan tradisi/budaya dan lain-lain— yang melekat pada setiap umat bukanlah perbedaan yang muncul secara tiba-tiba, tapi sudah dikonstruksi sedemikian rupa oleh yang mengkonstruksi, yaitu Allah swt. Mengingat perbedaan tersebut merupakan *Sunnatullah*, maka siapa pun yang ada di kosmos ini harus dan wajib mengakui keberadaan “lain” sebagai bagian dari yang “lain” untuk bisa menghirup dan hidup di udara yang sama ini. Dengan demikian, siapa pun yang mengingkarinya, sudah barang tentu menyalahi, bahkan keluar dari *Sunnatullah*—atau mungkin menantang kodrat-Nya.

Landasan teologis-normatif di atas sebenarnya telah memberikan kejelasan justifikasi mengenai hubungan antar sesama yang telah melampaui batas-batas etnis, ras, kelompok, golongan, bahkan agama sekalipun. Untuk itu, bangunan wawasan kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai egalitarianisme, pluralisme, multikulturalisme, humanisme, dan inklusifisme, tidaklah jauh dari panggung api Islam. Islam di bawa ke muka bumi justru untuk menciptakan nilai-nilai universal tersebut sebagaimana misi besarnya sebagai agama “pendamai” dan “perahmat” (*rahmatan li al-‘alamin*).

b. Perspektif Historis

Jika ditilik ke belakang, sejarah panjang Nabi saw. telah menunjukkan betapa pentingnya menjunjung prinsip-prinsip dasar nilai plural dan multikultural. Nabi saw. sendiri telah hidup di tengah-tengah komunitas yang sangat plural dan multikultural. Beliau membangun kebersamaan di tengah keragaman atas dasar teologi “*la ilaha illallah*” di Mekah selama 13 tahun, kemudian hijrah ke Yasrib, yang kemudian berganti nama menjadi Madinah. Masyarakatnya tidak hanya terdiri dari satu etnis, suku, bangsa, maupun agama; namun sangat beragam. Ada sejumlah suku dominan yang mendiami kota itu. Suku Aus, Khajraj, Qainuqa, Quraidlah, dan Bani Nadzir. Demikian pula penduduknya menganut beragam agama: Islam, Yahudi, dan sebagian kecil Kristen Najran. Dalam masyarakat Islam sendiri terdapat dua latar belakang, yaitu kaum migran atau pendatang yang disebut dengan sahabat

Muhajirin (dari beberapa suku asal Mekah dan sekitarnya), dan penduduk lokal yang biasa disebut sahabat Anshar, yang didominasi oleh suku Aus dan Khajraj. Sedangkan kaum Yahudi lebih berasal dari suku Nadzir, Qainuqa, dan Quraidlah.⁸

Dari keberagaman inilah, kemudian Nabi membuat suatu kesepakatan yang mengikat antar ragam yang ada, demi membangun kebersamaan, saling hormat dan menghargai akan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga terjalin komunitas yang tidak hanya stabil dan harmonis tapi juga bisa hidup saling berdampingan.

Kondisi masyarakat yang cukup plural dan multikultural tersebut, telah menginspirasi Nabi Muhammad saw. untuk mendirikan apa yang kemudian dikenal dengan “Negara Madinah”. Konsep Negara Madinah tertuang dalam (Piagam Madinah)”, yang mengandung nilai-nilai universalitas: Keadilan, kebebasan, persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan sama di mata hukum⁹.

Inilah yang kemudian dijadikan landasan oleh pesantren-pesantren Indonesia pada umumnya. Dalam kaitan ini, ada beberapa tradisi yang telah lama ditunjukkan oleh dunia pesantren, di mana pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua dalam perkembangan dinamika sejarah Indonesia. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh para pengamat, telah menunjukkan bahwa sejak awal perkembangannya (awal abad 16), pesantren —atau sejenisnya semacam surau, dayah, dan lain-lain nama sesuai daerahnya— mendakwahkan Islam dengan ramah dan mudah berakomodasi dengan watak budaya nusantara. Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua, pesantren mempunyai peran yang besar dalam proses Islamisasi (termasuk Islamisasi budaya) di Indonesia, dan bahkan di Asia Tenggara.¹⁰

Kemampuan pesantren berakomodasi dengan watak budaya nusantara yang beraneka ragam secara mudah, dan tidak tertindas dengan kemajuan zaman, cukup menjadi bukti

⁸ Said Agil Siradj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial* (Bandung: Mizan, 2006), 27

⁹ M. Syafi'i Anwar, *Menggali Kearifan*, 29

¹⁰ *Ibid.*, 3

sejarah bahwa sejak awal pesantren telah melangkah dan berproses secara terbuka terhadap perbedaan dan keanekaragaman. Penelitian disertasi lapangan yang cukup menarik oleh Prof. Lukens-Bull (1997) di Arizona State University (ASU) AS., telah mendukung bukti ini, bahwa kaum pesantren telah berhasil mengukir identitas baru. Mereka menolak dua bentuk taklid ala Kamal at-Taturk, dan bentuk penolakan Khumaini, terhadap segala sesuatu yang serba Barat dan modern; komunitas pesantren sadar dan peka terhadap globalisasi dan Mc-Donalisasi, tetapi tetap aktif merespon globalisasi dengan jihad damai pendidikan pesantren.¹¹

Menurut catatan sejarah, keistimewaan yang berhasil dicapai oleh pesantren karena didukung oleh adanya kurikulum pendidikan pesantren yang banyak memuat paham-paham multikulturalisme. Sebut saja kitab kuning (klasik), yang hingga kini masih tetap menjadi elemen dasar kurikulum lembaga pendidikan pesantren.

Di antara contoh konkrit adalah kitab *al-Milal wa an-Nihal*, yang ditulis oleh al-Syahrastani (479-485 H). Kitab tersebut mengulas tentang *firqah-firqah* (golongan-golongan) baik di dalam Islam maupun di luar Islam yang dipaparkan secara obyektif tanpa adanya keperluan menghina atau pun memuji, kitab *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* (kitab empat madzhab), ditulis oleh al-Jazairi, yang mengulas mengenai perbandingan pendapat ulama fiqih di lingkungan empat madzhab. Dari kedua kitab ini, cukup jelas sikap toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan semangat multikulturalisme yang ditanamkan.¹²

Dalam perkembangan sejarah kemerdekaan hingga berdirinya Republik Indonesia ini, pesantren telah menelorkan *pioneers* dan “Bapak Bangsa (*Founding Fathers*)”. Kita sebut misalnya, K.H. Hasyim Asy'ari dan putranya K.H.A. Wahid Hasyim, K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Mas Mansur, Prof. Kahar

¹¹ Masdar F. Mas'udi, *Mengenal Pemikiran Kitab Kuning*, dalam *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*, M. Dawam Rahardjo (ed.), (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1985), 218

¹² Hasyim, Syafiq, *Belajar Multikulturalisme dari Pesantren*, dalam *Jurnal Al-Wasathiyah*, Vol. 1, No. 1, Februari 2006, 66

Muzakkir, Ki Bagus Hadikusumo, H. Agus Salim, Sutan Syahrir, HAMKA, dan lain-lain. Beliau semua adalah jebolan pesantren, yang tidak hanya mumpuni dalam bidang agama, juga karena komitmennya dalam mempertahankan nilai-nilai universal kemanusiaan yang tinggi, tetapi juga karena kepemimpinan dan semangat nasionalisme dan kebangsaannya yang tinggi.¹³

c. Perspektif Sosiologis

Dalam kenyataan sejarahnya yang panjang, pesantren telah menunjukkan perannya sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang mampu merespon perkembangan modernisasi secara kritis serta mengarahkannya ke arah kehidupan yang lebih berwatak, kreatif, dan emansipatoris.

Hiroko Horikoshi, seorang antropolog Jepang dalam disertasinya yang berjudul "*A Traditional Leader in a Time of Change: The Kyai and Ulama' in West Java, (1976)*" menegaskan bahwa kyai dan pesantren sangat berperan dalam proses perubahan sosial menuju ke arah kualitas kehidupan dan kerja yang lebih baik di lingkungan masyarakat sekitarnya.

Selain itu, Manfred Ziemek, berasal dari Jerman yang telah menulis disertasi berjudul "*Pesantren Islamische Bildung in Sozialen Wandel*" (telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi *Pesantren dan Perubahan Sosial*, P3M, 1986), juga mengatakan bahwa kepemimpinan pesantren yang moralis, terbuka, humanis, dan emansipatoris telah berhasil mengantarkan pesantren sebagai agen perubahan yang kritis dan partisipatoris terhadap arus modernisasi yang tak terelakkan lagi dalam sejarah. Tesis Horikoshi dan Ziemek ini telah meng-*counter* tesis antropolog terkemuka Clifford Geertz yang cenderung kurang memberikan apresiasi terhadap peranan kyai sebagai agen perubahan sosial.¹⁴

Dengan demikian, Islam multikultural adalah sebetulnya perspektif teologis tentang penghargaan terhadap keragaman dan "sang lain" (*the other*). Suatu *assessment* teologis mengenai agama lain, kultur lain, dan etnik lain, dan penempatannya

¹³ M. Syafi'i Anwar, *Menggali Kearifan*, 4

¹⁴ Marzuki Wahid, dalam *Tashwirul Afkar*, No. 11, 2001, 46-49

secara layak dalam wilayah tatanan publik etis. Ia merupakan teologi Qur'ani yang membolehkan "sang lain" menjadi "yang lain" sebagai realitas yang secara etis diperkenankan atau bahkan keniscayaan.

Inilah perspektif teologis abad 21 yang berkomunikasi melampaui bahasa dan tradisi partikular. Meminjam istilah Abdul Aziz Sachedina, ini merupakan "*sensibilitas ekumene*" dari teologi multikulturalis yang menggambarkan perhatian dan kepedulian terhadap penduduk dunia, mempengaruhi kehidupan mereka melampaui batas-batas komunitas-komunitas keagamaan dan kultural. Tujuan luhur teologi multikulturalis (*summum bonum*) adalah pembebasan dari belenggu kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, kezaliman, dan ketidakadilan sebagai akibat dari relasi kolonial atas-bawah, dominasi-subordinasi, superior-inferior, menindas-tertindas baik dalam hubungan antar agama, etnik dan budaya.¹⁵

Dalam konteks tersebut, memperbincangkan diskursus Islam multikultural di Indonesia menemukan momentumnya. Sebab, selama ini Islam secara realitas seringkali ditafsirkan tunggal —bukan jamak atau multikultural. Padahal, di Nusantara realitas Islam multikultural sangat kental, baik secara sosio-historis maupun global (global-lokal). Secara lokal, misalnya, Islam di nusantara dibagi oleh Clifford Geertz dalam trikotomi: santri, abangan dan priyayi; atau dalam perspektif dikotomi Deliar Noer, yaitu Islam tradisional dan modern; dan masih banyak lagi pandangan lain seperti liberal, fundamental, moderat, radikal dan sebagainya. Secara sosio-historis, hadirnya Islam di Indonesia juga tidak bisa lepas dari konteks multikultural sebagaimana yang bisa dibaca dalam sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang dibawa oleh Walisongo.¹⁶

Berdasar pada ketiga diskursus di atas, pendidikan multikultural dalam Islam sebenarnya bukanlah hal baru. Hal ini paling tidak telah ditunjukkan oleh dunia pesantren dengan sistem dan pola pengajarannya yang sarat akan nilai-nilai

¹⁵ Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2005), 3

¹⁶ Choirul Fuad, *Mengkaji Ulang Islam Multikultural*, dalam <http://islamlib.com>.

multikulturalisme. Kondisi demikian tidak hanya dapat disaksikan melalui proses pengajaran dan pembelajarannya, tapi juga materi atau kurikulum yang diajarkannya. Di pesantren —sepanjang pengamatan dan pengalaman penulis— senantiasa diajarkan nilai-nilai moralitas untuk saling menghormati dan menghargai antar ragam, corak dan kemajemukan yang ada di sesama umat manusia, baik perbedaan agama, adat-istiadat, budaya, dan sebagainya. Inilah yang kemudian disebut dengan “tradisi pesantren”, yang merupakan dialog dan pergulatan panjang antara doktrin Islam dan tradisi setempat. Di dalam pesantren, melalui ajaran moralitas dan tasawuf (akhlaq) yang disampaikan, telah berkembang ajaran-ajaran perlunya menjunjung tinggi sikap-sikap toleransi (*tasamuh*), bersikap moderat (*tawasuf*) dan senantiasa konsisten dan optimis (*ta’adul* dan *istiqamah*). Inilah nilai-nilai dasar pembentukan karakter yang mesti ditanamkan dalam diri siswa selanjutnya.

Dengan demikian, pendidikan multikultur harus mencakup seluruh siswa (santri) tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnik, ras, budaya, daerah asal, dan strata sosial. Pendidikan multikultur, sebagaimana ditegaskan oleh James Banks paling tidak pendidikan yang mempunyai lima dimensi yang saling berkaitan.

- 1) *Content integration*. Mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu.
- 2) *The knowledge construction process*. Membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin).
- 3) *An equity pedagogy*. Menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya ataupun sosial.
- 4) *Prejudice reduction*. Mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka.
- 5) Melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang

berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik.¹⁷

Dalam kaitan ini, ada beberapa pertanyaan yang mesti dipertimbangkan, jika pendidikan multikultur ingin dipraktekkan dalam dunia pendidikan secara menyeluruh. Pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah siswa yang masuk ke dalam lembaga pendidikan tertentu memiliki kesempatan yang sama untuk membentuk dirinya secara penuh tanpa memandang ras, etnisitas, gender, status sosio-ekonomi, bahasa, kemampuan dan ketidakmampuan, serta identitas sosial lainnya?
- 2) Apakah kerja pendidikan yang ditawarkan kepada para siswa itu kontekstual dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas?¹⁸

C. MENUJU PENDIDIKAN INDONESIA YANG MULTIKULTUR

Pendidikan multikultur dimulai di Amerika Serikat (AS) sebagai gerakan reformasi pendidikan dalam rangka memperjuangkan hak-hak sipil kaum Amerika keturunan Afrika pada tahun 1960-an dan 1970-an. Perubahan kemasyarakatan yang mendasar seperti integrasi sekolah-sekolah negeri dan peningkatan populasi imigran telah memberikan dampak yang besar pada lembaga-lembaga pendidikan. Di antara kegagalan siswa dari kelompok marjinal yang putus sekolah di sana, disebabkan oleh lemahnya pemahaman tentang “pengetahuan budaya” untuk mencapai keberhasilan akademik para siswa.

Oleh karena itu, ada beberapa langkah yang perlu ditempuh dalam pemahaman pengetahuan budaya kepada siswa tersebut. Terkait dengan ini, James Bank mendeskripsikan evolusi pendidikan multi budaya dalam fase-fase berikut. *Pertama*, ada upaya untuk mempersatukan kajian-kajian etnis pada setiap tingkat kurikulum. *Kedua*, hal ini diikuti oleh pendidikan multi

¹⁷ Lihat James Banks dalam Muhaemin El-Ma'hady, *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural*, dalam <http://artikel.us/muhaemin>, 2004), 4

¹⁸ Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama....* 33

etnis, sebagai satu usaha untuk menerapkan persamaan pendidikan melalui reformasi keseluruhan sistem pendidikan. *Ketiga*, kelompok-kelompok marjinal yang lain seperti perempuan, orang cacat, kaum homo dan lesbi mulai menuntut perubahan-perubahan mendasar dalam lembaga pendidikan. *Keempat*, terjadinya perkembangan teori, riset dan praktek, perhatian pada hubungan antar ras, kelamin dan kelas (sosial) telah menghasilkan tujuan bersama bagi kebanyakan ahli teoritis dan praktisi pendidikan multikultur.¹⁹

Menurut Tilaar, perkembangan pendidikan multikultur di Amerika Serikat telah menempuh 4 fase perkembangan pendidikan sebagai berikut:

1. Pendidikan yang bersifat *segregasi*.
2. Pendidikan menurut konsep *salad bowl*.
3. Pendidikan menurut konsep *melting pot*.
4. Pendidikan multikultural.²⁰

Pendidikan yang bersifat *segregasi* dengan jelas membuat pemisahan dan pengelompokan sosial atas dasar ras dan warna kulit, yang dalam hal ini adalah ras kulit putih dan ras kulit hitam. Ras kulit putih sebagaimana diwujudkan dalam kebudayaan WASP (*White, Anglo Saxon, and Protestant*) yang dominan pada waktu itu mengadakan garis pemisah antara etnis kulit berwarna yang disebut Negro yang dianggap lebih rendah, dengan kelompok etnis putih yang dianggap mempunyai hak-hak istimewa, bahkan diperoleh langsung dari Sang Pencipta.

Sesuai dengan namanya, pendidikan menurut konsep *salad bowl* adalah pendidikan “gado-gado” yang semuanya dicampur dan dimasukkan dalam bejana atau “*bowl*”. Di dalam kehidupan sehari-hari berarti masing-masing kelompok etnis dapat hidup berdampingan secara damai dan keseluruhannya merupakan suatu perpaduan yang masing-masing berdiri sendiri. Tentunya konsep *salad bowl* tersebut belum merupakan suatu tujuan yang optimal di dalam memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang terdapat di dalam

¹⁹ J. Banks, *Multicultural Education: Historical development, dimensions, and Practice*, dalam *Review of Research in Education*, 1994), 19

²⁰ H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2004),

masing-masing budaya kelompok etnis yang memilikinya. Masing-masing etnis yang hidup bersama tidak peduli satu sama lainnya, masing-masing mengurus dirinya sendiri.

Dalam konsep *melting pot*, masing-masing kelompok etnis dengan budayanya sendiri menyadari adanya perbedaan antar sesamanya. Namun dengan menyadari adanya perbedaan tersebut, mereka dapat membina hidup bersama. Di sinilah terjadi sintesa kebudayaan dari masing-masing kelompok, yang dalam hal ini dimediasi melalui penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan multikultur, asal-usul budaya dan agama orang tidak dipersoalkan lagi dalam kehidupan bersama termasuk di sekolah, justru dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut dibangun komitmen-komitmen baru dalam masyarakat.

Di Indonesia, Jika ingin membangun pendidikan multikultur sebagaimana yang diproyeksikan oleh Amerika, maka paling tidak ada lima dimensi pendidikan multikultur yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. **Proses mengkonstruksi pengetahuan**, membantu siswa untuk memahami bagaimana asumsi-asumsi budaya secara implisit dalam suatu disiplin mempengaruhi cara-cara pengetahuan itu dikonstruksikan di dalamnya.
2. **Mengurangi prasangka kelompok** merupakan karakteristik dari perilaku rasial para siswa, dan bagaimana perilaku mereka dapat diubah melalui pengajaran.
3. **Suatu pemberdayaan untuk budaya sekolah dan struktur sosial**, berbagai praktek pelabelan kelompok, partisipasi olah raga, dan interaksi antara staf (guru) dan siswa, antar etnik dan ras merupakan beberapa komponen yang mesti dipahami sebagai cara untuk membangun budaya sekolah yang memperkuat para siswa dari seluruh kelompok (yang beragam).
4. **Suatu kesempatan yang sama dalam pendidikan**, memadukan gaya mengajar guru dan belajar siswa yang berbeda dalam rangka pencapaian akademik para siswa dari ras, budaya, maupun kelompok sosial yang beragam.
5. **Mengandung Integrasi**, menggunakan beragam contoh dan isi dari berbagai budaya dan kelompok yang berbeda untuk

memberikan ilustrasi atas berbagai konsep, prinsip, generalisasi, dan teori-teori kunci dalam berbagai mata pelajaran maupun disiplin (ilmu).²¹

Implementasi pendidikan multikultur dalam berbagai jenjang pendidikan hendaknya sejalan dengan keseluruhan isi pendidikan multikultur. Namun demikian jika ditilik dari isinya, kelima dimensi pendidikan multikultur di atas menyiratkan adanya permasalahan berupa “apa yang menjadi pesan utama pendidikan multikultur”. Pendidikan multikultur mengutamakan persamaan (*equality*) ataukah mengedepankan keberagaman (*diversity*). Masing-masing pilihan tentunya mengandung konsekuensi logis. Pilihan terhadap prioritas mana yang akan didahulukan akan disesuaikan dengan konteks sosio budaya masing-masing masyarakat.

Untuk menjawab pertanyaan “apa yang menjadi pesan utama pendidikan multikultur” di atas, berikut ini diajukan dua pendekatan, yaitu: (a) pendekatan tradisional dan (b) pendekatan ethnocentris. Dalam pandangan pendekatan tradisional, tujuan utama dari pendidikan awal (sekolah dasar) tidaklah mengajarkan perbedaan kepada siswa. Untuk itu, para pendidik harus memahami keberagaman, namun pada saat yang bersamaan mencari kesamaan-kesamaan di antara berbagai keberagaman yang ada pada diri siswa.²²

Dijelaskan, bahwa salah satu tujuan siswa belajar di kelas adalah untuk mempelajari suatu identitas publik. Anak-anak belajar bilangan dan angka yang krusial untuk bertahan dalam kehidupan bersama (*public*), dan belajar untuk meletakkan diri pada konteks publik, bagian dari komunitas keluarga maupun etnik.

Pendekatan etnosentris lebih menekankan akan keunikan identitas masing-masing kelompok dalam masyarakat. Perbedaan budaya bukanlah suatu kesalahan. Pengetahuan akan kebiasaan dan masyarakat lain memberikan pilihan kepada siswa. Dalam pendekatan ini, suatu kurikulum multikultural mencoba memberikan penilaian akan keberagaman, dengan mengajarkan suatu kurikulum yang terbuka kepada siswa dengan latar belakang yang beragam.

²¹ J. Banks, *Multicultural.....*, 19

²² Jawa Pos, 18 April 2007

Pendidikan multikultur selain bermanfaat dalam membentuk wacana multikultural, ternyata efektif juga untuk mengurangi prasangka kelompok satu terhadap kelompok lainnya.²³ Oleh karena itu, pembentukan wacana multikultur pada masyarakat Indonesia dapat menjadi medium bagi upaya untuk mereduksi munculnya budaya prasangka yang pada gilirannya dapat berfungsi sebagai pemicu munculnya konflik-konflik.

Hal yang melandasi pemilihan tema ini adalah multikulturalisme pada dasarnya juga bagian dari kebenaran agama. Pemahaman yang ingin dibentuk melalui pendidikan multikultur adalah sikap beragama yang bercorak inklusif, humanis, dan pada saat bersamaan menjauhkan kehidupan agama dari bentuk yang bercorak eksklusif (tertutup). Sebab salah satu bahaya pemahaman eksklusif terhadap sebuah keyakinan adalah hilangnya penghargaan terhadap keyakinan lain. Padahal kisah penghargaan terhadap perbedaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran agama sebagaimana terucap dalam kitab-kitab suci.

Sebagaimana diketahui, bahwa Islam adalah agama damai dan agama rahmat bagi seluruh alam yang hidup di muka bumi ini. Namun demikian, yang kemudian muncul sebagai bibit persoalan, tidak sedikit ayat-ayat dalam kitab suci yang dapat dimaknai ganda bahkan mengandung bias, mengajarkan saling menghargai sekaligus mendorong eksklusivisme. Di sinilah perlu kiranya dikembangkan wacana multikulturalisme dalam kehidupan baragama bagi setiap pemeluk agama melalui cara beragama yang lebih bercorak inklusif (terbuka), yang mengedepankan kebersamaan tanpa harus kehilangan keyakinan dan identitas keagamaannya.

Untuk mentransformasikan nilai-nilai multikulturalisme pada diri siswa, sekaligus menanamkan kehidupan keberagaman yang inklusif, peran fungsional guru adalah strategis. Melalui dialog interaktif-edukatif di kelas, guru akan dapat mentransformasikan pengetahuan, sikap maupun nilai-nilai inklusif kepada siswa.

²³ Hanurawan, F., & P. Waterworth, *Multicultural Perspectives in Indonesia Sosial Studies and Student Prejudice Reduction*”, dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, 1997),

Model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia (*founding fathers*) dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, seperti terungkap dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi: "kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah".

Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk. Ulasan mengenai multikulturalisme, harus mencakup berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat mutu produktivitas.

Kalau kita melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat sampai perang dunia ke-2, masyarakat di wilayah tersebut hanya mengenal satu kebudayaan, yaitu kebudayaan kulit putih (*white skin*) yang Kristen. Golongan lain yang ada dalam masyarakat tersebut dikategorikan sebagai minoritas dengan segala hak-hak mereka dikebiri atau dibatasi. Di Amerika Serikat, berbagai gejolak untuk persamaan hak bagi golongan minoritas dan kulit hitam (*black skin*) serta kulit berwarna (*colour skin*) mulai muncul di akhir tahun 1950-an. Puncaknya adalah pada tahun 1960-an dengan dilarangnya perlakuan diskriminasi oleh orang kulit putih terhadap orang kulit hitam dan berwarna di tempat-tempat umum, perjuangan hak-hak sipil, dan dilanjutkan perjuangan hak-hak sipil ini secara lebih efektif melalui berbagai kegiatan *affirmative action*. Kegiatan ini membantu mereka yang terpuruk dan minoritas, untuk dapat mengejar ketertinggalannya dari kulit putih yang dominan di berbagai posisi dan jabatan dalam beragam bidang pekerjaan.²⁴

Perkembangan berikutnya terjadi pada tahun 1970-an yang diwarnai dengan penyebarluasan konsep multikulturalisme ini dalam bentuk mulai diberikannya pendidikan multikultur pada siswa di berbagai sekolah. Bahkan dewasa ini anak-anak Cina, Meksiko, dan berbagai golongan suku bangsa lainnya dapat belajar

²⁴ Parsudi Suparlan, *Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural*, dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 69, 2002),

di sekolah dengan menggunakan bahasa-bahasa ibu mereka dalam tahap-tahap tertentu.

Bagi bangsa Indonesia, model masyarakat multikultural dapat menjadi bingkai untuk memformat masyarakat Indonesia baru. Sebagai sebuah model masyarakat multikultural Indonesia adalah sebuah masyarakat yang berdasarkan ideologi multikulturalisme, atau "bhineka tunggal eka yang multikultural", yang melandasi corak struktur masyarakat Indonesia pada tingkat lokal dan nasional.²⁵

Oleh karena itu, sebagai landasan bagi bangunan masyarakat Indonesia yang multikultural, diperlukan adanya pedoman etika dan pembakuannya sebagai acuan bertindak, sesuai dengan adab dan moral bangsa Indonesia. Pedoman etika yang ada hendaknya memuat nilai-nilai dasar filosofis multikulturalisme yang berorientasi pada penghormatan HAM, kesejahteraan dan keadilan sosial.

D. MENGGAGAS IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTUR DI INDONESIA

Pentingnya pendidikan multikultur bagi bangsa Indonesia setidak-tidaknya karena dua alasan penting, yaitu: (1) kemajemukan budaya, etnisitas, faham, dan religi yang terdapat dalam masyarakat, dan (2) kecenderungan tatanan masyarakat masa depan dengan cirinya, yakni era globalisasi.

Alasan pertama lebih menunjuk pada realitas sosial bangsa Indonesia yang bersifat multi etnis, multi budaya, multi faham, dan multi religi. Kondisi masyarakat yang bercorak plural mengandung dua potensi, yaitu potensi positif dan potensi negatif. Masyarakat yang majemuk akan menjadi kekuatan yang dahsyat manakala keberadaan masing-masing unsur sosial dihargai dan diberikan kesempatan untuk berkembang, sehingga masing-masing unsur akan memperkaya khazanah sosial maupun budaya bangsa. Sebaliknya, kondisi kemajemukan akan menjadi

²⁵ Thoha Hamim, *Islam dan Hubungan Antar Umat Beragama*" dalam *FORMA*, (Surabaya: Majalah Mahasiswa Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2001, Edisi XXVI), 2.

kekuatan yang destruktif manakala negara (*state*) mendisposisi satu kelompok, baik yang didasarkan atas etnisitas, budaya, faham, maupun religi di atas kelompok lainnya, sehingga masing-masing unsur tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri.

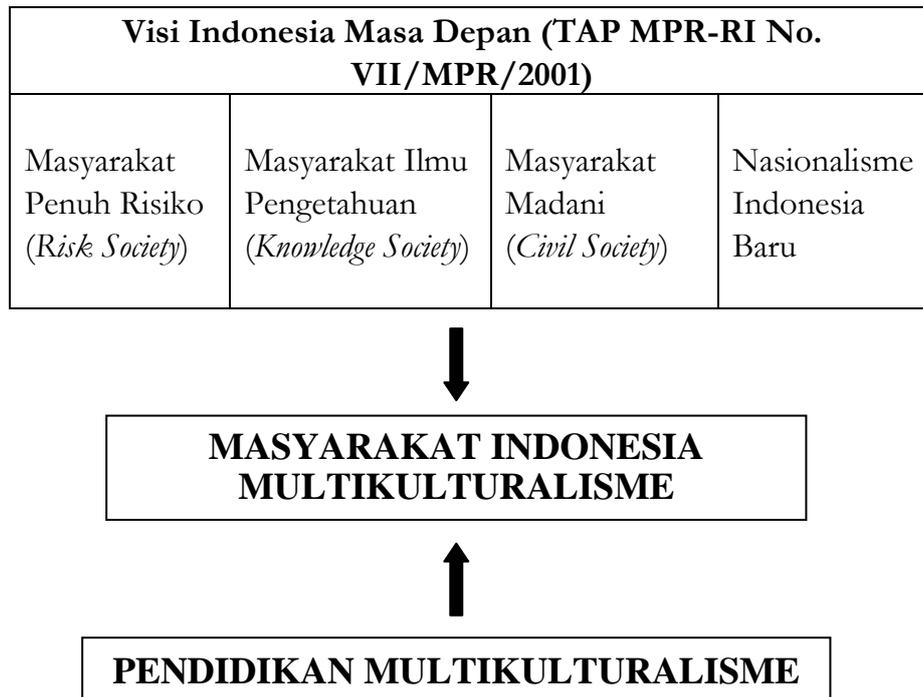
Aspek kedua menunjuk pada dimensi masa depan bangsa yang bercirikan globalisasi. Di era global, pada satu sisi, interaksi hubungan antar bangsa akan semakin intens karena dukungan perangkat teknologi transportasi, teknologi komunikasi, maupun teknologi informasi. Lalu lintas barang, orang dan jasa akan semakin intensif, yang tentunya pada batas-batas tertentu akan semakin menumbuhkan pengakuan akan adanya identitas budaya yang beragam. Pada sisi yang lain, keadaan tersebut bisa membutakan diri terhadap berbagai kenyataan budaya global yang beragam, hanya akan melahirkan sikap-sikap eksklusif yang menafikan berbagai realitas sosial dan berujung pada upaya menumbuhsuburkan paham-paham eksklusif (tertutup).

Namun demikian, hingga kini memang masih dicari suatu format yang lebih sesuai untuk mengimplementasikan pendidikan multikultur bagi bangsa Indonesia. Menurut Tilaar, pendidikan multikultur di Indonesia hendaknya memperhatikan dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. *Right to culture* dan identitas budaya lokal.
2. Kebudayaan Indonesia yang menjadi.
3. Konsep pendidikan multikultur yang normatif.
4. Pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial.
5. Pendidikan multikultur di Indonesia memerlukan paedagogik baru.
6. Pendidikan multikultur bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia masa depan dan etika berbangsa.²⁶

Keseluruhan dimensi di atas mestinya dijadikan dasar untuk mengimplementasikan pendidikan multikultur di Indonesia. Terkait dengan adanya kaitan antara multikulturalisme, visi Indonesia masa depan dengan pendidikan multikultur, dapat diilustrasikan pada bagan berikut:

²⁶ H.A.R Tilaar, *Multikulturalisme...24*



(Sumber : Tilaar, 2004 Multikulturalisme dan Visi Indonesia Masa Depan).

Dari bagan di atas, dapat diketahui, bahwa pendidikan multikultur di Indonesia diarahkan untuk mencapai terbentuknya masyarakat Indonesia yang bercorak multikultural. Sedangkan masyarakat Indonesia yang multikultural berbasis pada kecenderungan masyarakat masa depan, yaitu: Masyarakat penuh resiko, masyarakat ilmu pengetahuan, masyarakat madani, dan nasionalisme.

Oleh karena itu, pendidikan multikultur untuk masyarakat Indonesia hendaknya tetap diletakkan dalam konteks dan kerangka nasionalisme Indonesia. Artinya, melalui implementasi pendidikan multikultur yang intinya memberikan pengakuan akan adanya perbedaan etnis, budaya dan agama; namun tetap pada saat yang bersamaan, juga memberikan kesadaran akan kedudukan kita sebagai satu bangsa yang hidup dalam Negara yang sama, yakni Indonesia.

1. Tujuan Pendidikan Multikultur

Tujuan program pendidikan multikultur kira-kira dapat dirumuskan, yaitu untuk membantu peserta didik: (1)

memahami latar belakang diri dan kelompok dalam masyarakat; (2) menghormati dan mengapresiasi kebhinekaan budaya dan sosio-historik etnik; (3) menyelesaikan sikap-sikap yang terlalu etnosentris dan penuh prasangka; (4) memahami faktor-faktor sosial, ekonomis, psikologis, dan historis yang menyebabkan terjadi polarisasi etnik, ketimpangan, dan keserasian etnik; (5) meningkatkan kemampuan menganalisis secara kritis masalah-masalah rutin dan isu, melalui proses demokratis dengan cara inkuiri dialogis; (6) mengkonseptualisasi dan menginspirasi visi tentang masyarakat yang lebih baik, adil dan bebas; dan (7) mengembangkan jati diri yang bermakna bagi semua orang.²⁷

Adapun jenis kompetensi yang diharapkan akan dikuasai oleh peserta didik setelah mereka mengikuti pembelajaran pendidikan multikultur adalah:

- a) Mengembangkan kompetensi akademik standar dan dasar tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan, demokrasi, keadilan, kebebasan, persamaan derajat, atau saling menghargai dalam keragaman budaya.
- b) Mengembangkan kompetensi sosial, agar dapat menumbuhkan pemahaman tentang latar belakang budaya sendiri dan budaya lain dalam masyarakat.
- c) Mengembangkan kompetensi akademik untuk menganalisis dan membuat keputusan yang cerdas tentang isu-isu dan masalah keseharian melalui sebuah proses demokratis, atau inkuiri dialogis.

2. Strategi Pembelajaran Multikultur

Menurut Hanurawan ada kaitan antara penerapan strategi pembelajaran pendidikan multikultur dengan tingkat kematangan peserta didik. Implementasi pendidikan multikultur untuk jenjang pendidikan dasar (sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama atau MI dan Madrasah), pendidikan menengah (Sekolah Menengah Atas dan MA), dan yang di perguruan tinggi atau yang berlaku di masyarakat.²⁸

²⁷ I.G. Widja, *Pendidikan Multikultur....*

²⁸ Lihat Hanurawan, *Multikultural Perspektif.....*

Untuk jenjang pendidikan dasar, digunakan strategi “inklusif” yang ditempuh dengan cara menyisipkan materi pendidikan multikultur dalam *subject matter* atau mata pelajaran yang sudah ada. Untuk jenjang pendidikan menengah, digunakan strategi “eksklusif” yang dilaksanakan dalam bentuk pembahasan pendidikan multikultur sebagai sebuah kajian, misalnya dilaksanakan dalam kegiatan ko-kurikuler atau ekstra kurikuler. Sedangkan untuk orang dewasa, pendidikan multikultur dilaksanakan dalam bentuk “studi kasus” yang ditempuh dengan jalan mendiskusikan berbagai kasus dan fenomena sosial di masyarakat yang bernuansakan multikultural.

3. Konsep-Konsep Pembelajaran

Ada beberapa konsep dasar pembelajaran pendidikan multikultural yang dapat ditawarkan di sini. Di mana konsep pembelajaran pendidikan multikultural tersebut paling tidak harus megacu kepada hal-hal berikut:

- Konsepnya cair, terbuka untuk beragam interpretasi.
- Pandangannya komprehensif untuk kejernihan pemahaman dan pendidikan.
- Dinamika perubahan budaya dapat terjadi melalui pembelajaran.

Adapun model pembelajaran yang ditawarkan dalam pendidikan multikultural adalah sebagaimana kisi-kisi di bawah ini:

Model I : Revisi Pembelajaran

1. a. Monokultur—multikultur.
b. Esensial, diskriminatif—keagamaan, toleran, dan terbuka.
2. Tidak terbatas pada dimensi kognitif (informasi keagamaan budaya).
3. Penulisan ulang sejarah bangsa dari perspektif yang lebih beragam dan tidak balas dendam.

Model II : Revisi Materi Pembelajaran & Reformasi Sistem Pembelajaran

1. Sekolah merupakan medium penting untuk perubahan perspektif siswa serta untuk perubahan masyarakat.

2. Pendidikan multikultur merupakan transformasi pendidikan, siswa punya keperluan untuk mempola di tingkat lokal, nasional dan global.
3. Tidak hanya masyarakat beragam.

Model III : Informal

1. Berbagai Perjalanan interpersonal.
2. Penampilan pahlawan-pahlawan multikultur di wilayah konflik.
3. Pelatihan/pertemuan membahas isu multikultural.
4. Informasi tentang hal etnis lain di media massa dan kebudayaan populer.

E. PENUTUP

Uraian di atas menunjukkan bahwa, multikulturalisme sebenarnya bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Multikulturalisme –jika ditilik dalam sejarahnya yang panjang— pada hakikatnya adalah ciri khas asli masyarakat kita. Multikulturalisme menjadi menarik untuk diperbincangkan, karena saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada pupusnya rasa kebersamaan, persaudaraan, kesetiakawanan sosial, keadilan, konflik antar anak bangsa, rasa nasionalisme, dan lain-lain. Jika demikian adanya, maka tidak ada salahnya memilih multikulturalisme sebagai *mainstream* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, pendidikan multikultural adalah sebuah tawaran solutif dalam rangka menjawab kompleksitas persoalan bangsa. Sudah saatnya pendidikan multikultur di Indonesia menjadi pilihan penting seiring dengan munculnya keberagaman di berbagai aspek, baik tradisi, kultur, etnik, faham, kelompok/golongan, maupun agama, di tengah-tengah kehidupan kita, di samping tuntutan sosial di era global.

Wallahu a'lamu bi as-sawab.

Daftar Pustaka

- Choirul Fuad, *Mengkaji Ulang Islam Multikultural*, dalam <http://islamlib.com>.
- F. Hanurawan, & P. Waterworth, *Multicultural Perspectives in Indonesia Sosial Studies and Student Prejudice Reduction*, dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, 1997.
- H.A.R. Tilaar, *Multikulturalisme Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2004.
- J. Banks, *Multicultural Education: Historical development, dimensions, and Practice*, dalam *Review of Research in Education*, 19, 1994.
- Jawa Pos, 18 April 2007.
- M. Syafii Anwar, *Menggali Kearifan Pesantren untuk Multikulturalisme*, dalam *Al-Wasathiyah*, Vol. 01, No. 01 Februari 2006.
- Marzuki Wahid, dalam *Tashwirul Afkar*, No. 11, 2001.
- Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, Bandung: Mizan, 1999.
- Masdar F. Mas'udi, *Mengenal Pemikiran Kitab Kuning*, dalam *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*, M. Dawam Rahardjo (ed.), Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1985.
- Muhaemin El-Ma'hady, *Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural*, dalam <http://artikel.us/mubaemin>, 2004.
- Parsudi Suparlan, *Menuju Masyarakat Indonesia Yang Multikultural*, dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, No. 69, 2002.
- Said Agil Siradj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial*, Bandung: Mizan, 2006.
- Syafiq Hasyim, *Belajar Multikulturalisme dari Pesantren*, dalam *Jurnal Al-Wasathiyah*, Vol. 1, No. 1, Februari 2006.

- Sutandyo Wignyosubroto, “*Pluralitas dalam Realitas Kehidupan Nasional (dengan Berbagai Permasalahan SARA-nya), Pluralisme dan Persatuan Indonesia*”, Makalah disampaikan pada *Seminar Nasional “Konsep SARA dalam Tinjauan”*, Surabaya: Kosmopolit, 1998.
- Thoha Hamim, *Islam dan Hubungan Antar Umat Beragama*’ dalam *FORMA*, Surabaya: Majalah Mahasiswa Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, Edisi XXVI, 2001.
- Widja, I.G. dan K. Putra, ”*Pendidikan Multikultur*” makalah disajikan dalam *Konvensi Nasional pendidikan Indonesia V*, Surabaya: 5-9 Oktober 2004.
- Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2005.
- _____, “*Ber-Islam di Era Multikultural*”, dalam <http://islamlib.com>.